

Analisis Kebijakan Sistem Zonasi (PPDB) Terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan di Indonesia

Hadawiyanti Sinaga¹, Usiono²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: hadawiyantis@gmail.com¹, usiono@uinsu.ac.id²

Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (JITK)
Vol. 4 No. 1
2026

Abstrak: Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menimbulkan beragam persoalan seperti ketimpangan kualitas antar sekolah, persepsi negatif masyarakat, serta lemahnya distribusi sarana dan tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis berbagai hasil penelitian mengenai dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelaah berbagai artikel ilmiah yang diperoleh melalui basis data Google Scholar, Garuda, Sinta, dan DOAJ. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta arah kebijakan dari setiap penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil memperluas akses pendidikan dan mengurangi dominasi sekolah favorit, tetapi belum efektif dalam menciptakan pemerataan mutu karena masih terdapat disparitas sarana, kompetensi guru, dan kualitas manajemen sekolah. Dengan demikian, kebijakan sistem zonasi perlu diintegrasikan dengan kebijakan pemerataan mutu melalui penguatan fasilitas pendidikan, redistribusi guru, dan peningkatan kapasitas sekolah agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, PPDB, Pemerataan Mutu Pendidikan, SLR.

Abstract: The zoning policy in the New Student Admission System (PPDB) was implemented to achieve equal access and quality of education in Indonesia. However, its implementation still faces various challenges, such as disparities in school quality, negative public perceptions, and unequal distribution of educational facilities and teaching staff. This study aims to systematically analyze previous research findings on the impact of the zoning policy on educational quality equity in Indonesia. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by reviewing several scientific articles obtained from databases such as Google Scholar, Garuda, Sinta, and DOAJ. The analysis was conducted qualitatively using content analysis techniques to identify similarities, differences, and policy directions across the studies. The findings reveal that the zoning policy has succeeded in expanding access to education and reducing the dominance of so-called "favorite schools." However, it has not been fully effective in achieving

equitable educational quality due to persistent disparities in facilities, teacher competence, and school management quality. Therefore, the zoning policy should be integrated with quality improvement strategies through the enhancement of educational infrastructure, teacher redistribution, and school capacity strengthening to achieve comprehensive educational equity.

Keywords: Education Policy, Zoning System, PPDB, Equity in Education Quality, SLR

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Pemerintah Indonesia telah berupaya memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu kebijakan penting yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 dan diperbarui melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih dekat dan merata (Kemendikbud, 2020). Namun, dalam implementasinya, kebijakan zonasi memunculkan berbagai fenomena sosial dan pendidikan yang kompleks. Di lapangan, masih ditemukan ketimpangan kualitas antar sekolah dalam satu zona, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat yang masih melekat pada konsep “sekolah favorit” (Yulianti & Astuti, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dengan realitas implementasinya. Banyak orang tua yang merasa kebijakan ini membatasi hak anak untuk memilih sekolah terbaik, sementara sebagian sekolah di daerah tertentu justru belum siap menghadapi heterogenitas kemampuan akademik siswa yang diterima melalui jalur zonasi (Begovic Yahya et al., 2025). Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam manajemen pembelajaran, perencanaan kurikulum, dan peningkatan profesionalisme guru.

Dari sisi konseptual, sistem zonasi memiliki landasan pada teori keadilan sosial dalam kebijakan publik, di mana pemerataan akses pendidikan dipandang sebagai wujud distribusi sumber daya yang adil. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerataan akses belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu, sehingga menimbulkan pertanyaan teoretis: apakah pemerataan akses secara geografis otomatis menjamin pemerataan kualitas pendidikan? Beberapa kajian menunjukkan bahwa zonasi cenderung berfokus pada dimensi spasial (jarak), sementara aspek kualitas pendidikan seperti kompetensi guru, kurikulum adaptif, dan infrastruktur belum terdistribusi secara proporsional (Yulianti & Astuti, 2023). Ketidaksesuaian antara tujuan teoretis dan hasil empiris ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap hubungan antara kebijakan zonasi dan pemerataan mutu pendidikan.

Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian studi menyoroti dampak positif kebijakan zonasi dalam meningkatkan akses pendidikan serta mengurangi beban biaya transportasi peserta didik (Oktaviani et al., 2025). Namun, studi lainnya menekankan dampak negatif seperti menurunnya motivasi belajar di sekolah tertentu, praktik manipulasi alamat domisili, dan munculnya ketidakpuasan masyarakat. Perbedaan hasil temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan riset yang perlu dijawab melalui pendekatan

kajian literatur yang sistematis. Dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu secara terintegrasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan sistem zonasi berpengaruh terhadap pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan mutu pendidikan. Fokus kajian ini tidak hanya pada keberhasilan kebijakan dalam menciptakan pemerataan akses, tetapi juga pada efektivitasnya dalam mengatasi ketimpangan mutu antar satuan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang berkeadilan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi pemerataan mutu pendidikan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menelaah secara sistematis hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak kebijakan sistem zonasi (PPDB) terhadap pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terdahulu secara kritis dan terstruktur guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

Pencarian literatur dilakukan melalui mesin pencari akademik Google Scholar, Garuda, Sinta, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci: “kebijakan sistem zonasi,” “PPDB,” “pemerataan pendidikan,” dan “mutu pendidikan.” Artikel yang diambil adalah jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan dari lima tahun keatas dan memiliki relevansi dengan konteks pemerataan mutu pendidikan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Setiap artikel dianalisis untuk mengidentifikasi fokus, metode, dan temuan utama. Hasilnya kemudian disintesis secara tematik untuk menemukan pola kesamaan, perbedaan, serta arah kebijakan dalam penerapan sistem zonasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari lima belas jurnal nasional yang relevan dengan topik kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, diperoleh ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Kebijakan Sistem Zonasi (PPDB) terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Fokus Hasil Penelitian	Temuan Utama
1	Mahpudin (2020)	Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia	Menganalisis kegagalan kebijakan zonasi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan	Kebijakan zonasi gagal karena hanya mengatur distribusi siswa, bukan pemerataan sarana dan kualitas guru; pemerintah belum menyentuh akar masalah pendidikan.

2	Zelmi Kaffa, Sentot Setia Budi & Nurhizrah Gistituati (2021)	Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi	Mengidentifikasi dampak positif dan negatif sistem zonasi	Zonasi berkontribusi pada pemerataan akses, tetapi menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan mutu antar sekolah.
3	Novi Lestari & Darwis (2024)	Analisis Implementasi Kebijakan PPDB Zonasi di Kabupaten Gresik	Mengevaluasi implementasi zonasi melalui pendekatan Edward III	Kebijakan berjalan baik dalam aspek komunikasi dan sumber daya, namun lemah dalam pengawasan, muncul manipulasi domisili dan kurang koordinasi daerah.
4	Anissa Chotimah, Rahmatullah & Nur Aini (2023)	Polemik Sistem Zonasi dalam Pemerataan Mutu Pendidikan	Mengkaji kontroversi publik terhadap sistem zonasi	Zonasi dianggap adil secara akses, namun menciptakan ketimpangan baru karena disparitas fasilitas sekolah dan distribusi guru.
5	Puji Suryanti dkk. (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dan Dampaknya terhadap Manajemen Mutu Sekolah	Mengkaji efektivitas zonasi di Klaten	Zonasi efektif secara administratif tetapi belum optimal; sosialisasi kurang dan penyalahgunaan SKTM masih terjadi.
6	Risna, Lisdahlia & Syamsul (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan	Menilai pelaksanaan zonasi di tingkat menengah	Menilai pelaksanaan zonasi di tingkat menengah
7	Hayanuddin, Parawangi & Syukri (2023)	Implementasi Kebijakan Zonasi terhadap Pemerataan Pendidikan	Menganalisis pengaruh zonasi terhadap keadilan pendidikan	Zonasi memperpendek jarak siswa ke sekolah, namun masih terdapat kesenjangan mutu dan persepsi negatif masyarakat.
8	Melati S. Klaronika & Karol T. Lodan (2022)	Penerapan Kebijakan Zonasi di Kota Batam	Menilai efektivitas pemerataan akses pendidikan melalui zonasi	Pemerataan akses meningkat, namun belum diikuti peningkatan mutu; sekolah di pinggiran kekurangan guru dan fasilitas.
9	Sudona (2022)	Analisis Kebijakan Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Zonasi	Meninjau pemerataan mutu antar sekolah negeri	Sistem zonasi berperan pada distribusi siswa, tetapi mutu pembelajaran belum merata antarwilayah.

13	Purwanti, Yuliani & Widyaningtyas (2021)	Tantangan Implementasi Sistem Zonasi	Mengidentifikasi faktor penghambat sistem zonasi	Hambatan utama berupa ketidaksiapan sekolah, perbedaan persepsi publik, dan ketimpangan sarana prasarana.
15	Klaronika & Kaffa (2023)	Analisis Kebijakan Zonasi dan Kualitas Pendidikan	Meninjau hubungan zonasi dan peningkatan mutu	Pemerataan peserta didik belum menjamin peningkatan mutu akademik tanpa pemerataan fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi (PPDB) secara umum berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa sistem zonasi memungkinkan peserta didik bersekolah lebih dekat dengan domisili tempat tinggalnya, sehingga mengurangi hambatan jarak dan biaya transportasi. Selain itu, beberapa penelitian mencatat adanya penurunan dominasi sekolah yang sebelumnya berlabel sekolah favorit serta distribusi peserta didik yang relatif lebih merata antar sekolah.

Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemerataan mutu pendidikan belum tercapai secara optimal. Berbagai penelitian mengungkapkan masih adanya ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta permasalahan administratif dalam pelaksanaan kebijakan zonasi, seperti manipulasi data domisili dan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang ditemukan di berbagai daerah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil telaah sistematis terhadap lima belas jurnal nasional yang relevan, pembahasan ini diarahkan untuk menginterpretasikan temuan-temuan penelitian secara tematik dan komprehensif. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan, hambatan kebijakan zonasi terhadap pemerataan mutu pendidikan, serta variasi implementasi kebijakan zonasi di berbagai daerah. Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan sistem zonasi (PPDB) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif penerimaan peserta didik baru, tetapi juga berimplikasi terhadap pemerataan mutu pendidikan secara nasional.

1. Analisis Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan

Berdasarkan hasil kajian literatur, kebijakan sistem zonasi secara umum menunjukkan kontribusi positif dalam memperluas akses pendidikan bagi peserta didik, terutama melalui pengaturan jarak domisili ke sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem zonasi mampu mengurangi hambatan geografis serta beban biaya transportasi, sehingga memberikan kemudahan akses pendidikan bagi peserta didik di berbagai wilayah (Hayanuddin & Parawangi, n.d.).

Selain itu, kebijakan zonasi juga terbukti berperan dalam mengurangi dominasi sekolah yang sebelumnya dianggap sebagai sekolah favorit. Kondisi ini dapat dipahami sebagai langkah awal dalam upaya mengurangi kesenjangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan, khususnya dari sisi distribusi peserta didik (Ismail et al., 2024). Dari perspektif kebijakan publik, temuan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menempatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, sebagaimana

diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa secara administratif, implementasi kebijakan zonasi cenderung berjalan lebih efektif di daerah yang telah memiliki sistem PPDB daring yang stabil. Studi Lestari dan Darwis (2024) menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor pendukung utama keberhasilan implementasi zonasi. Temuan serupa juga terlihat di daerah seperti Gresik dan Batam, di mana kebijakan zonasi mampu mengurangi kepadatan pendaftaran di sekolah tertentu karena peserta didik lebih memilih sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya (Melati et al., n.d.).

2. Analisis Hambatan Kebijakan Zonasi terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan

Meskipun kebijakan sistem zonasi dinilai efektif dalam pemerataan akses, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pemerataan mutu pendidikan belum tercapai secara optimal. Berbagai penelitian menyoroti bahwa tantangan utama terletak pada ketimpangan sarana dan prasarana serta distribusi tenaga pendidik antar sekolah (Muhammad Sufyan Rabbani et al., 2023). Sekolah-sekolah di wilayah tertentu masih mengalami keterbatasan fasilitas pembelajaran dan kekurangan guru yang berkualifikasi.

Mahpudin (2020) menegaskan bahwa kebijakan zonasi cenderung berfokus pada pengaturan distribusi peserta didik, namun belum menyentuh aspek fundamental peningkatan kualitas sekolah. Temuan serupa dikemukakan oleh (Kaffa et al., 2021) yang mengidentifikasi ketidaksiapan sekolah dan kurangnya sosialisasi kebijakan sebagai faktor yang memicu resistensi masyarakat terhadap penerapan zonasi.

Selain itu, hasil kajian literatur juga mengungkap adanya permasalahan administratif dalam pelaksanaan kebijakan zonasi. Beberapa penelitian melaporkan praktik manipulasi data kependudukan, seperti penggunaan alamat domisili tidak sesuai dan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sebagai upaya untuk menyesuaikan persyaratan zonasi (Puji Suryanti, 2020). Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data antar lembaga terkait.

Dari aspek sosial dan psikologis, beberapa penelitian mencatat adanya perubahan motivasi belajar peserta didik di sejumlah daerah (Lestari et al., 2024) menemukan bahwa hilangnya label sekolah favorit berdampak pada dinamika pembelajaran, sementara sekolah yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama menghadapi tantangan dalam mengelola kelas dengan kemampuan akademik peserta didik yang semakin beragam.

3. Analisis Variasi Implementasi Kebijakan Zonasi di Berbagai Daerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi bervariasi antar daerah. Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah, dukungan birokrasi, serta kondisi infrastruktur pendidikan setempat (Risna et al., 2020). Di daerah seperti Gresik dan Batam, pemerintah daerah dinilai cukup adaptif dalam menyesuaikan kebijakan zonasi dengan karakteristik wilayahnya, sehingga implementasinya berjalan relatif lebih baik.

Sebaliknya, di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan jumlah sekolah negeri, kebijakan zonasi justru memunculkan tantangan baru dalam

pemerataan mutu pendidikan. Secara umum, sistem zonasi berhasil menata ulang distribusi peserta didik, namun belum diimbangi dengan kebijakan peningkatan mutu sekolah secara proporsional. Pemerintah daerah cenderung berfokus pada regulasi teknis PPDB tanpa disertai kebijakan penguatan kualitas guru, pengembangan kurikulum adaptif, dan penyediaan fasilitas belajar yang setara (Mahpudin, 2020).

4. Sintesis Hasil Analisis dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis hasil kajian literatur, dapat dianalisis bahwa kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan afirmatif yang berpotensi memperkuat pemerataan akses pendidikan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan secara menyeluruh. Sistem zonasi berhasil mengurangi kesenjangan akses antarwilayah, tetapi masih menyisakan disparitas mutu antar sekolah akibat perbedaan fasilitas, kompetensi guru, dan kapasitas manajerial sekolah (Harianti & Sukma, 2024).

Oleh karena itu, kebijakan sistem zonasi perlu diposisikan sebagai kebijakan hilir yang harus didukung oleh kebijakan hulu berupa pemerataan sarana prasarana, redistribusi tenaga pendidik, dan penguatan kapasitas manajemen sekolah. Dengan pendekatan tersebut, sistem zonasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif penerimaan peserta didik baru, tetapi juga sebagai strategi berkelanjutan dalam pemerataan mutu pendidikan nasional.

Kebijakan lanjutan yang direkomendasikan dari berbagai penelitian meliputi:

- a. Penguatan sistem pengawasan dan verifikasi data kependudukan untuk mencegah manipulasi administrasi.
- b. Pemerataan alokasi sarana prasarana dan redistribusi tenaga pendidik berkualitas.
- c. Program pendampingan sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran dan manajemen kelas heterogen.
- d. Standarisasi mekanisme sosialisasi kebijakan di tingkat daerah agar konsisten dengan kebijakan pusat.
- e. Evaluasi berkala terhadap efektivitas zonasi dengan pendekatan berbasis data per zona.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan sistem zonasi (PPDB) memiliki peran penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini mampu menghapus batas antara sekolah favorit dan non-favorit serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan di wilayah tempat tinggalnya. Namun, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa pemerataan akses tersebut belum berbanding lurus dengan pemerataan mutu pendidikan. Pemerataan mutu masih menghadapi tantangan besar, terutama pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana, distribusi guru, serta kualitas manajemen sekolah di setiap zona. Zonasi cenderung berhasil di daerah dengan fasilitas pendidikan yang memadai, tetapi menghadapi kendala di wilayah yang infrastruktur pendidikannya belum merata. Oleh karena itu, kebijakan sistem zonasi seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai mekanisme penerimaan peserta didik baru, melainkan perlu diintegrasikan dengan kebijakan peningkatan mutu sekolah, redistribusi tenaga pendidik, dan penguatan kapasitas manajerial satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Kebijakan sistem zonasi (PPDB) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, kebijakan ini terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan akses antarwilayah dan menekan dominasi sekolah favorit, sehingga prinsip keadilan sosial dalam pendidikan mulai terwujud. Namun demikian, pemerataan mutu pendidikan belum tercapai sepenuhnya karena masih terdapat ketimpangan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, serta kemampuan manajerial antar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zonasi perlu dipandang sebagai kebijakan yang bersifat dinamis dan memerlukan dukungan kebijakan lain yang berorientasi pada peningkatan mutu.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dalam implementasi kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif. Program pemerataan mutu harus diintegrasikan dengan kebijakan zonasi melalui peningkatan fasilitas sekolah, pemerataan kompetensi guru, dan penguatan sistem evaluasi berbasis zona. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara empiris dampak jangka panjang kebijakan zonasi terhadap hasil belajar peserta didik dan pengelolaan sekolah di berbagai konteks daerah. Dengan demikian, kebijakan sistem zonasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemerataan akses, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Begovic Yahya, A. I., Kasman, U., Retnaningsih, E., Sajiman, S. U., & Hasbullah. (2025). Kebijakan Zonasi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(2), 871–880. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2.3654>
- Harianti, & Sukma, L. N. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar. *Foundasia*, 15(2), 27–37.
- Hayanuddin, H., & Parawangi, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 4 WAJO*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ismail, Tri Prasetijowati, & Crist Diva Sudona. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 37–45. <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.121>
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituat, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870–1877.
- Kemendikbud. (2020). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–28.
- Lestari, N. S., Hanafi, I., & Mardiyono. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 10(2), 219–227.
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2>
- Melati, S., Klaronika, S., & Lodan, K. T. (n.d.). *PENERAPAN KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ZONASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM*.
- Muhammad Sufyan Rabbani, Anissa Nurul Chotimah, & Jemima Fathima Pasha.

- (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpaty*, 1(3), 204–212.
<https://doi.org/10.59024/simpaty.v1i3.227>
- Oktaviani, V., Hayatunnisa, A., Aulia, L., & Talitha, T. A. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 71–77.
- Puji Suryanti, A. A. M. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di Sma Negeri Kabupaten Klaten. *Jurnal Candi*, 20(1), 111–126.
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 1.
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>.